

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEGATASI KERISIS AIR BERSIH DI DESA PEYARING KECEMATAN MOYO UTARA

Loya Lani Gesi Raka Siwi
gesiraka792@gmail.com
Universitas Teknologi Sumbawa

ABSTRAK

Dasar yang sangat vital dan tidak tergantikan bagi kehidupan manusia. Air bersih tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi, tetapi juga untuk menjaga kebersihan, mendukung kegiatan rumah tangga, serta menjamin kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kenyataannya, tidak semua daerah memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan serius adalah Desa Peyaring di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Desa ini mengalami krisis air bersih yang berlangsung cukup lama dan berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Permasalahan ini semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya alam, kurangnya infrastruktur, dan tidak meratanya distribusi air bersih di seluruh wilayah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih serta menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan dan program terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Peyaring telah menerapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembangunan jaringan pipa dan bak penampungan, pemanfaatan Dana Desa untuk pengadaan sarana air bersih, pengadaan tandon darurat saat musim kemarau, serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD, Dinas PUPR, dan LSM lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kerusakan fasilitas akibat bencana atau usia pemakaian, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola fasilitas air bersih. Selain itu, belum adanya regulasi desa yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan sumber daya air menjadi hambatan dalam menjamin keberlanjutan program. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan sinergi dengan lembaga eksternal, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan air bersih yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan di masa depan. **Kata Kunci:** Kebijakan Desa, Krisis Air Bersih, Desa Peyaring, Pemerintahan Desa, Moyo Utara, Partisipasi Masyarakat, Infrastruktur Air, Pengelolaan Sumber Daya Air.

PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan dan akses terhadap air bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai daerah pedesaan di Indonesia, masih banyak ditemukan kasus keterbatasan akses air bersih, termasuk di Desa Peyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan, serta kurangnya infrastruktur air bersih yang memadai.

Krisis air bersih di Desa Peyaring bukan hanya berdampak pada kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, sanitasi, dan pendidikan. Dalam menghadapi persoalan ini, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengelola Dana Desa, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk

meningkatkan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air bersih.

Namun, kebijakan yang diambil sering kali dihadapkan pada kendala teknis, keterbatasan dana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara komprehensif bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi krisis air bersih, sejauh mana efektivitasnya, serta apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi yang dapat dikembangkan ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang kebijakan pemerintah desa dalam menangani krisis air bersih di Desa Peyaring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Krisis Air Bersih

Krisis air bersih yang terjadi di Desa Peyaring, Kecamatan Moyo Utara, merupakan masalah yang kompleks dan berkepanjangan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta beberapa warga, diketahui bahwa krisis air bersih di desa ini terjadi karena beberapa warga yg memiliki sumur telah menutup sumur mereka dikarenakan telah memasang system PDAM di wilayah tersebut, namun sistem PDAM yang diharapkan oleh masyarakat menjadi solusi utama dari krisis tersebut belum bisa beroperasi secara optimal. Dikarenakan musim kemarau Banyak sumur warga yang mengalami kekeringan, dan sumber mata air yang biasanya digunakan mulai menunjukkan penurunan debit air. Faktor lingkungan juga menjadi penyebab utama, seperti adanya alih fungsi lahan dan penggundulan hutan di wilayah hulu yang menyebabkan berkurangnya daya serap tanah dan mempercepat aliran permukaan, sehingga ketersediaan air tanah pun menurun drastis.

Pemerintah Desa Peyaring menyadari urgensi permasalahan ini dan telah mengambil beberapa langkah kebijakan strategis dalam rangka mengatasi krisis air bersih. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pembangunan sumur bor di beberapa titik strategis yang dekat dengan permukiman warga. Program ini dibiayai melalui Dana Desa, dan dilaksanakan secara bertahap setiap tahun. Selain itu, pemerintah desa juga membangun saluran pipanisasi dari mata air alami yang masih aktif di kawasan perbukitan menuju permukiman warga. Pembangunan ini dilakukan melalui sistem padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, baik dalam pembangunan fisik maupun dalam pemeliharaan sarana air bersih.

Tidak hanya membangun infrastruktur fisik, pemerintah desa juga membentuk Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KPSAB) yang bertugas untuk mengelola distribusi air, merawat fasilitas, serta mengatur iuran sukarela warga untuk operasional dan perawatan. Dalam beberapa dusun yang telah mendapatkan aliran air dari pipanisasi, masyarakat menyatakan bahwa akses air menjadi lebih mudah, tidak lagi harus berjalan jauh atau membeli air dari luar desa. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.

Namun, meskipun sudah ada perkembangan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala di lapangan. Keterbatasan dana menjadi tantangan utama, mengingat cakupan wilayah Desa Peyaring cukup luas, sementara anggaran Dana Desa harus dibagi untuk berbagai program pembangunan lainnya. Selain itu, kondisi geografis desa yang berbukit dan memiliki banyak dusun terpencil menyulitkan pembangunan saluran air yang merata. Di beberapa wilayah, masyarakat masih mengandalkan air hujan yang

ditampung dalam drum atau mengangkut air dari sumber yang jauh. Hal ini menunjukkan bahwa program air bersih belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga desa secara merata.

Berdasarkan Transparansi Dan Keterlibatan Masyarakat

1. **Transparansi Kebijakan**
 - a. Sumber Pendanaan Jelas: Dana pembangunan sumur bor dan pipanisasi bersumber dari Dana Desa, disampaikan dalam Musyawarah Desa dan tercantum dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
 - b. Informasi Terbuka: Informasi mengenai lokasi pembangunan, biaya, dan tahapan kegiatan diumumkan melalui papan informasi desa dan pertemuan warga.
 - c. Pelaporan Berkala: Kegiatan pembangunan dan hasilnya dilaporkan secara terbuka oleh pemerintah desa dan diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. **Keterlibatan Masyarakat Aktif**
 - a. Sistem Padat Karya: Warga dilibatkan langsung dalam pembangunan sarana air bersih (penggalian, pemasangan pipa, pembangunan bak penampung).
 - b. Pembentukan KPSAB: Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih terdiri dari perwakilan masyarakat yang mengatur distribusi air, pemeliharaan fasilitas, dan pengumpulan iuran secara gotong royong.
 - c. Gotong Royong dan Sukarelawan: Masyarakat ikut menjaga dan memperbaiki instalasi air serta melakukan patroli sumber mata air.
3. **Sosialisasi dan Edukasi**
 - a. Pemerintah desa rutin melakukan penyuluhan tentang pentingnya air bersih, pemakaian air hemat, serta peran warga dalam menjaga kelestarian sumber air.
 - b. Edukasi menysasar semua kalangan, termasuk pemuda dan ibu rumah tangga, agar kesadaran kolektif tumbuh sejak dini.
4. **Tanggapan dan Umpan Balik Warga**
 - a. Warga diberi ruang menyampaikan aspirasi melalui forum diskusi dan pertemuan dusun.
 - b. Beberapa dusun yang telah mendapat manfaat pipanisasi menyatakan kepuasan karena tidak perlu lagi membeli atau mengangkut air dari jauh.
5. **Tantangan dan Solusi Bersama**
 - a. Masalah: Masih ada warga yang kurang peduli terhadap fasilitas (misalnya membuang sampah di sekitar sumber air).
 - b. Solusi: Pemerintah desa menggandeng tokoh masyarakat dan pemuda untuk menjadi agen perubahan dan contoh bagi warga lainnya.
6. **Upaya Lanjutan Kolaboratif**
 - a. Pemerintah desa akan menggandeng LSM dan program CSR melalui pendekatan kolaboratif dan transparan.
 - b. Program air bersih akan diintegrasikan dalam RPJMDes, dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaannya melalui Musrenbangdes.

Komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun mitra pembangunan, untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi secara menyeluruh, merata, dan berkelanjutan.

Kebijakan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Peyaring telah mengupayakan beberapa kebijakan, antara lain:

1. Pembangunan sumur bor dan bak penampungan air melalui Dana Desa.
2. Pembuatan saluran distribusi air dari sumber mata air ke beberapa dusun.
3. Pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih (KPSAB).
4. Edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga sumber air dan penghematan penggunaan air.

Efektivitas Implementasi Kebijakan

Kebijakan tersebut cukup efektif mengurangi kelangkaan air di beberapa wilayah desa, terutama setelah adanya pipanisasi dan sumur bor. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan cakupan program belum menyeluruh. Beberapa dusun masih bergantung pada penampungan air hujan dan air sungai yang kurang higienis.

Tantangan Dan Solusi

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi: keterbatasan dana, medan geografis yang sulit, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur. Solusinya antara lain:

1. Menjalin kemitraan dengan LSM dan sektor swasta.
2. Pelibatan aktif warga melalui gotong royong dan pengawasan fasilitas air.
3. Perencanaan jangka panjang untuk pembangunan sistem air terpadu berbasis desa.

Sumber Air Bersih

Desa Peyaring mengalami krisis air bersih sejak infrastruktur PDAM rusak akibat banjir. Saat ini, warga hanya mengandalkan satu sumber air gravitasi, sementara sumber lainnya rusak. Warga juga memanfaatkan mata air dan sungai secara swadaya untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah desa menyediakan bak penampung 3.000 liter sebagai solusi sementara, namun distribusi masih belum merata. Perlu perbaikan infrastruktur dan penambahan sumber air alternatif agar kebutuhan air bersih terpenuhi secara berkelanjutan.

Tetapi sekarang imperasteruktur seperti sumur gali atau dpot isi ulang sudah tersedia jumlah sumur gali sekarang sudah menyentuh 110 titik dan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sudah bayak di pasang oleh warga walaupun penyaluran ya Masi belum optimal tapi Masi bisa membatu keperluan air bersih PDAM suda berada 359 titik di desa peyaring dan Depot isi ulang sudah ada 4 di desa peyaring diharap kan hal tersebut dapat mengurangi kerisis air bersih yg terjadi di masyarakat desa peyaring

Kebijakan Tertulis Penyediaan Air Bersih di Wilayah Desa

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan dasar. Kebijakan penyediaan air bersih di wilayah desa diarahkan untuk:

1. Menjamin Akses Air Bersih yang Layak

Pemerintah desa wajib memastikan bahwa seluruh warga desa memiliki akses terhadap air bersih yang memenuhi standar kesehatan, baik untuk konsumsi maupun kebutuhan sehari-hari.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Air Lokal

Sumber air yang tersedia seperti sumur gali, sumur bor, mata air, dan sungai kecil harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan dilengkapi dengan sarana penjernihan dan penyimpanan air (tandon atau bak penampung).

3. Bekerja Sama dengan PDAM dan Lembaga Terkait

Dalam hal desa belum mampu menyediakan air secara mandiri, kebijakan mengatur kerja sama antara desa dengan PDAM, BPBD, atau instansi terkait untuk distribusi air secara berkala.

4. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dilibatkan melalui kelompok pengelola air desa (misalnya HIPPAM atau BUMDes) untuk pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana air bersih.

5. Landasan Hukum

Kebijakan ini mengacu pada:

- Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Infrastruktur Dasar.

- Peraturan Daerah/Kabupaten yang mengatur pengelolaan air bersih dan sanitasi.

6. Penganggaran Dana Desa

Pemerintah desa mengalokasikan anggaran dari Dana Desa atau sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penyediaan air bersih.

KESIMPULAN

Krisis air bersih di Desa Peyaring disebabkan oleh faktor alam dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang cukup strategis, seperti pembangunan sumur bor, pipanisasi, dan pembentukan kelompok pengelola. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh keterbatasan dana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan berbasis kolaborasi dan perencanaan yang lebih menyeluruh.

Saran

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana air bersih.
2. Perlu ada pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air.
3. Dibutuhkan kerja sama dengan pihak luar (NGO dan sektor swasta) untuk mendukung program desa.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang pentingnya menjaga dan mengelola sumber air secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). Pedoman Penggunaan Dana Desa untuk Infrastruktur Dasar
- Rahmawati, L. (2020). "Peran Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Daerah Rawan Air." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10(1), 45-55.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- WHO. (2017). *Drinking-water*. World Health Organization.